

PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM SKEMA
BAGI HASIL PADA SEKTOR PARIWISATA
(PADA WISATA AIR PANAS DESA BORA
KECAMATAN SIGI KOTA
KABUPATEN SIGI)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh :

ARDI SETIAWAN
NIM: 19.5.15.0137

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Dalam Skema Bagi Hasil Pada Sektor Pariwisata (Pada Wisata Air Panas Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi)” oleh mahasiswa atas nama Ardi Setiawan NIM: 19.5.15.0137, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

2023 M

1444 H

Palu, Agustus

Rajab

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Sitti Aisyah, S.El., M.El
NIP.

Nuriatullah, S.El., M.EK
NIP.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, Agustus 2023 M
Rajab 1444 H

Penulis/ Peneliti.

Ardi Setiawan
NIM: 19.5.15.0137

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Ayahanda Tasbi dan Ibunda Salma yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah SWT membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya.
2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Dr. H. Abidin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. H. Kamaruddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mohamad Idhan, S,Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
3. Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Drs Sapruddin M.H.I sebagai Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Malkan, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Sitti Aisyah, S.El., M.El selaku Pembimbing I dan Nuriatullah, S.El., M.EK selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
7. Staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Rifai Dongko selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah banyak memberikan bantuan berupa referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Pengelola Wisata Air Panas Bora yang telah memberikan izin penelitian.
10. Aparat serta masyarakat Desa Bora yang telah memberikan informasi.

11. Teman-temanku Dina Handayani, Irmawati, Nina Nuraini, Nur Faizy, Rifki yang telah banyak memberikan bantuan, semangat dan motivasi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, Agustus 2023

Penulis,

Ardi Setiawan
NIM: 19.5.15.0137

ABSTRAK

Nama : Ardi Setiawan
NIM : 19.5.15.0137
Judul Skripsi : Pengelolaan Keuangan Dalam Skema Bagi Hasil Pada Sektor Pariwisata (Pada Wisata Air Panas Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten sigi)

Pengelolaan keuangan wisata air panas di Desa Bora dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi dan pelaksanaannya dilakukan bersama masyarakat Desa Bora. Masalah yang terjadi dalam pengelolaan keuangan wisata air panas di Desa Bora adalah ketidaksesuaian bagi hasil dengan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi dan Masyarakat Desa Bora setempat dilakukan dalam perjanjian tersebut jika terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung pihak pengelola saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam skema bagi hasil pada Wisata Air Panas Desa Bora dan faktor penghambat penerapan sistem bagi hasil pada Wisata Air Panas Desa Bora. Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yaitu pengelola wisata air panas Bora, perangkat desa dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam skema bagi hasil pada Wisata Air Panas Desa Bora belum sesuai dengan perjanjian. Perjanjian antara pihak yang mempunyai lahan dengan pihak pengelola kawasan wisata Air panas Bora yang dilakukan secara tidak tertulis ini belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Dalam kerja sama apapun pada dasarnya tidak selalu untung, namun ada juga yang mengalami kerugian, baik karena kesalahan dari pihak pengelola maupun lainnya. Dalam praktik kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan objek wisata ini pun juga ada pro dan kontranya antara kedua belah pihak karena sering terjadi kerusakan spot wisata dan kerugian ditanggung pemilik lahan untuk memperbaiki kerusakan. Faktor penghambat penerapan sistem bagi hasil pada wisata air panas Desa Bora adalah minimnya anggaran dan kurangnya sarana dan prasarana. Anggaran pengelolaan pariwisata yang bersumber dari APBD masih sangat minim dalam rangka pengembangan infrastruktur dari wisata air panas Bora yang berdampak kepada kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas penunjang bagi wisatawan yang ingin melakukan kegiatan wisata

Dari kesimpulan yang diperoleh diharapkan bagi pengelola wisata air panas Bora dan pemilik lahan, diharapkan dapat membuat perjanjian secara tulis sehingga pembagian bagi hasil dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pemerintah desa menjadi fasilitator antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi agar dapat membuat kesepakatan secara tertulis mengenai pengelolaan bagi hasil wisata air panas Bora

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
---------------------	---

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
.ii	
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Masalah Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	8
C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Kehadiran Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	
.....35	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan	38
B. Hasil Penelitian	47
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Wisata Air Panas Bora Tahun 2018-2022	2
Tabel 2.1 Matriks Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Desa Bora	38
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.3 Jenis Ternak	40
Tabel 4.4 Jenis Perikanan	40
Tabel 4.5 Mata Pencaran	41
Tabel 4.6 Jumlah Aparat Desa	41
Tabel 4.7 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis dalam aspek sosial seperti penciptaan lapangan kerja dan aspek budaya¹. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata¹. Perkembangan pariwisata saat ini terbilang sangat cepat, dengan banyaknya rute-rute penerbangan, destinasi wisata baru, serta meningkatnya akomodasi yang membuktikan bahwa pariwisata sangat berpotensi meningkatkan perekonomian suatu negara.

Adanya otonomi daerah menjadikan masing-masing daerah berupaya memanfaatkan potensi daerahnya. Sehingga berupaya untuk berkontribusi menjadikan wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini berdampak terhadap lingkungan

¹ Hartono, Hari. *Perkembangan Pariwisata, Kesempatan Kerja, dan Permasalahannya*. (Jakarta: Prisma, 1994).

sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Berkembangnya sektor wisata di Kabupaten Sigi yang terdiri dari wisata bahari yang berada di bawah laut dan di atas laut, wisata sejarah, wisata budaya dan wisata agro yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata rekreasi. Salah satunya adalah wisata air panas Desa Bora yang terletak di desa Bora Kecamatan Sigi Kota. Tempat wisata ini berkontribusi langsung terhadap perekonomian lokal dan sosial budaya masyarakat, wisata air panas Bora bukan hanya wisata air panas seperti biasanya tetapi air panas merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Sigi yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah karena keindahan alamnya yang memukau pengunjung. Wisatawan lokal sering mengunjungi tempat ini.

Berikut perkembangan jumlah pengunjung wisata air panas Desa

Bora:

Tabel 1.1
Jumlah Pengunjung Wisata Air Panas Bora Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Pengunjung
2018	4.176
2019	5.289
2020	3.187
2021	2.787

2022	4.723
------	-------

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pengunjung wisata air panas Desa Bora berfluktuasi. Pengunjung wisata air panas didominasi oleh wisatawan yang berasal dari daerah Sigi dan Kota Palu. Pengunjung wisata air panas sebagian besar berkunjung diakhir pekan. Pengunjung pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing 3.187 dan 2.787 pengunjung mengalami penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya pada tahun 2018-2019 masing-masing 4.176 dan 5.289 pengunjung. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang menerapkan *sosial distancing*. Tahun berikutnya 2022 telah mengalami peningkatan setelah pasca pandemi berakhir. Jumlah pengunjung yang tergolong signifikan banyak menandakan bahwa wisata air panas Bora memiliki daya tarik wisatawan.

Pengembangan wisata air panas Desa Bora menumbuhkan banyak harapan bagi masyarakat sekitar, terutama harapan dari segi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian juga dari segi sosial masyarakat yang lebih baik sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat lokal sekitar. Sehubungan dengan hal ini maka pengembangan wisata air panas Desa Bora adalah suatu bentuk pengembangan wilayah desa yang lebih cenderung pada penggalian

potensi desa dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam desa sebagai atribut produk wisata. Keberadaan sebuah kegiatan wisata pedesaan sepatutnya memperhatikan, melibatkan, dan memberikan peran yang proporsional kepada masyarakat setempat selaku pemilik sah dari lingkungan pedesaan.

Peran serta masyarakat desa setempat sangat penting, terkait dengan dasar dan arah pengembangan desa wisata. Di desa Bora juga terdapat komunitas atau organisasi desa seperti kelompok keagamaan, kelompok para perempuan, kelompok kesenian yang berhubungan langsung dengan objek wisata untuk penyambutan tamu dan lain-lain. Warga desa dan pemerintah desa dapat memanfaatkan aset sosial ini dengan cara membentuk jejaring dengan mereka guna menjadikan masyarakat semakin tahu mengenai pemanfaatan wisata serta menjaga kelestarian lingkungan daerah wisata tersebut.

Pengelolaan keuangan wisata air panas di Desa Bora dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi dan pelaksanaannya dilakukan bersama masyarakat Desa Bora. Masalah yang terjadi dalam pengelolaan keuangan wisata air panas di Desa Bora adalah ketidaksesuaian bagi hasil dengan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi

dan Masyarakat Desa Bora setempat dilakukan dalam perjanjian tersebut jika terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung pihak pengelola saja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Keuangan dalam Skema Bagi Hasil Pada Sektor Pariwisata (Pada Wisata Air Panas Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi) ” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam skema bagi hasil pada Wisata Air Panas Desa Bora?
2. Apa saja faktor penghambat penerapan sistem bagi hasil pada Wisata Air Panas Desa Bora?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam skema bagi hasil pada Wisata Air Panas Desa Bora.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penerapan sistem bagi hasil pada Wisata Air Panas Desa Bora.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Kajian teoritis

- 1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsi sebagai alternatif untuk menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keuangan pada khususnya, yaitu yang terkait dengan pengelolaan keuangan dalam skema bagi hasil pada Wisata Air Panas Desa Bora.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

b. Kajian praktis

Bagi pengelola air panas Bora, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi kebijakan penetapan bagi hasil yang dilakukan selama ini.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan Sebagai tambahan referensi bagi dunia penelitian di lingkungan akademik dan profesional agar dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan skema bagi hasil.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Pengelolaan Keuangan dalam Skema Bagi Hasil Pada Sektor Pariwisata (Pada Wisata Air Panas Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi)”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul proposal ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung didalamnya, sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan sampai pengawasan keuangan wisata air panas di Desa Bora
2. Bagi hasil adalah akad kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi dan Masyarakat Desa Bora dalam pengelolaan keuangan wisata air panas di Desa Bora.

E. Garis-Garis Besar Isi

Rangkaian penulisan skripsi ini garis besar isi proposal ini penulis paparkan secara sistematis ke dalam tiga bab secara berturut-turut sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan terakhir adalah garis-garis besar isi proposal.

Bab II yaitu bab kajian pustaka yang membahas mengenai penelitian terdahulu, dan tinjauan pustaka.

Bab III yaitu bab metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV yaitu bab hasil dan pembahasan yang membahas mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara.

Bab V yaitu bab penutup terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tawari dkk (2013) ¹	Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Madidihang Skala Kecil Di Kabupaten Seram Bagian Barat	1) pola bagi hasil yang berlaku di lokasi studi belum memenuhi aspekbagihasil yangproporsional, berkeadilan,berkeuntungan danberkelanjutan 2)pendapatannelayan berdasarkan pola bagi hasil yang berlaku masih berada di bawah UMP ideal, 3)sistembagi hasil yang ideal adalah dengan pola 52:48,dimana pemilikmendapatkan bagian 52persendan nelayanmemperoleh 48 persendarihasil tangkapanbersih	Bagi hasil Metode penelitian	Lokasi penelitian
2	Musdalifa dkk (2021) ¹	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal	Sistem bagi Hasil yangdilakukanmasyarakat di Kecamatan tombolo Pao di dasarkan pada perjanjian yang telahdisepakati oleh kedua belah	Bagi hasil Metode penelitian	Lokasi penelitian

¹Tawari dkk, *Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Madidihang Skala Kecil*

Di Kabupaten Seram Bagian Barat. Buletin PSP Vol. 2 No. 1, hal 237-245, 2013

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa	pihak, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti di atas kertas yang memperkuat perjanjian tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama yaitu karena adanya petani yang tidak memiliki lahan untuk di garap dan ada juga pemilik lahan yang kewalahan jika harus mengolah sendiri lahannya. Sistem bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana jawaban dari salah satu pemilik lahan mengatakan bahwa apabila semua biaya dikeluarkan oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan 2/3 bagian sementara petani penggarap hanya mendapat 1/3 bagian saja.		
3	Janah dkk (2021) ²	Bagi Hasil Pemilik Lahan dengan dengan Petani Penggarap di Kecamatan Karangrejo	Pembagian bagi hasil didasarkan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dengan petani penggarap.	Bagi hasil Metode penelitian	Lokasi penelitian

B. Landasan Teori

² Janah dkk Bagi Hasil Pemilik Lahan dengan dengan Petani Penggarap di Kecamatan Karangrejo. *Jurnal Ekonesia*, Volume 1, No. 1, 2021

1. Teori Stakeholder

Ramizes dalam bukunya *Cultivating Peace*, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder. Friedman mendefinisikan stakeholder sebagai: “*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.*”

¹Terjemahan bebasnya adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Biset secara singkat mendefinisikan stakeholders adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan *Grimble and Wellard* melihat stakeholders dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki.³ Dari definisi tersebut, maka stakeholders merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai *stakeholders theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak.

Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada

³ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta, 2012), 112

pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya.¹

Premis dasar dari teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.⁴

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian,

⁴ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, (Bandung: Alfabeta), 2014, 68

keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya.¹

2. Teori *Agency*

Teori keagenan (*agency theory*) adalah asas yang digunakan untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan hubungan antara pelaku bisnis dan agen. Secara umum hubungan ini antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajer sebagai agen. Manajemen adalah pihak yang dipercayakan untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham karena itu pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua hasil pekerjaannya kepada pemegang saham.

Jensen & Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih dari satu orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan

suatu tugas atas nama prinsipal yang juga termasuk menyerahkan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajer mempunyai kewajiban dalam menjalankan perusahaan untuk mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh pemilik perusahaan (*principle*) yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik saham melalui peningkatan nilai perusahaan.

Agency relationship didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (disebut *owners* atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (*utility maximizers*), cukup beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji.

3. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha⁵. Sedangkan menurut Anwar manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan¹.

Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga jika disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan⁶.

⁵ Purba, Djahatmo. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi. Kedua, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 23

⁶ Armereo, C., Marzuki, A., dan Seto, A. A. *Manajemen Keuangan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 23

Manajemen keuangan menurut para ahli dalam manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berbubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan¹.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berkaitan dengan perencanaan, pengarahannya, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan⁷. Sedangkan menurut Wijaya ruang lingkup dari manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana¹. Menurut Anwar manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan⁸.

⁷ Jatmiko. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), 12

⁸ Anwar, M. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Perusahaan. (Jakarta: Kencana, 2019), 33

Tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh dari praktik. Disamping itu untuk mewujudkannya seorang pengelola wajib mengikuti prinsip¹:

1. Konsistensi, merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan.
2. Akuntabilitas, merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pengelola sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang terdapat dalam usaha. Prinsip akuntabilitas ini memiliki maksud agar pihak pengelola dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan
3. Transparansi, prinsip ini merupakan petunjuk untuk memberikan semua rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam hal laporan keuangan.
4. Kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri. Untuk mewujudkan kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri maka kesehatan keuangan harus terjaga. Pengeluaran di tingkat operasional atau di tingkat strategis disesuaikan dengan besaran dana yang dimiliki.

Dalam pengelolaan keuangan ini, pihak pengelola memiliki rencana yang terintegrasi dengan mengurangi risiko sekecil mungkin.

Pengelolaan keuangan tidaklah hanya untuk memaksimalkan laba melainkan untuk meminimumkan biaya hal ini dikarenakan melalui pengelolaan yang baik diharapkan mampu menekan biaya-biaya yang mungkin timbul dari operasi perusahaan⁹. Oleh karena itu setiap perusahaan harus memiliki sumber daya insani yang mumpuni, profesional untuk mencapai visi misi perusahaan yang telah dicanangkan perusahaan termasuk dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Menurut ada beberapa tujuan dari pengelolaan dana perusahaan yaitu¹:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan
2. Menjaga stabilitas financial dalam situasi yang selalu terkontrol.
3. Memperkecil *risk* perusahaanaan masa kini dan yang masa yang akan datang.

Ketiga tujuan tersebut dapat diadaptasi dalam perusahaan seperti pengelolaan wisata air panas di Desa Bora. Memaksimalkan nilai

⁹Armereo, C., Marzuki, A., dan Seto, A. A. *Manajemen Keuangan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 25

perusahaan dapat ditumbuhkan dari jiwa para pengelola sehingga ada nilai edukasi, nilai kecintaan alam, nilai kebersihan dan hiburan sebagainya yang didapatkan oleh pengunjung. Berbarengan dengan nilai pendapatan yang meningkat bagi perusahaan.

Mengorganisasikan administrasi sebenarnya merupakan pekerjaan yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Menata administrasi dimulai dengan memilah-milah berkas atau file kedalam kelompok permasalahan yang sama atau serupa. Tujuan menata file adalah untuk memudahkan pencarian apabila kelak diperlukan sebagai bahan referensi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Manajemen tidak dapat menyiapkan perencanaan tanpa adanya data yang akurat. Kegiatan administrasi yang perlu dilaksanakan perusahaan¹⁰ :

1. Administrasi piutang,

Piutang adalah kekayaan perusahaan yang di dalam laporan neracadiletakan pada sisi asset atau aktiva. Administrasi piutang merupakan catatan yang penting. Catatan yang benar dan terkini sebagai informasi internal dan eksternal. Dalam kondisi eksternal piutang dapat dijadikan agunan kepada pemberi pinjaman untuk

¹⁰ Hartati, S. *Manajemen Keuangan Untuk Usaha Mikro dan Kecil*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 45

mengatasi keuangan jangka pendek. Manfaat bagi informasi internal adalah untuk perencanaan dan evaluasi atau pengendalian.

2. Administrasi Hutang,

Hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal. Pada neraca akun hutang diletakkan pada sisi passive atau liability. Pencatatan hutang perusahaan sama pentingnya dengan piutang. Laporan tentang posisi hutang akan memberi peringatan kepada pelaku usaha untuk melakukan berbagai langkah antisipasi

3. Administrasi persediaan

Persediaan merupakan kekayaan perusahaan. Dalam neraca akun persediaan diletakkan pada sisi aktiva di bawah akun piutang. Persediaan memiliki peran yang strategic baik usaha yang bergerak di bidang perdagangan maupun manufaktur. Administrasi yang dilakukan secara tepat waktu sangat membantu pemilik usaha mengambil keputusan kapan harus membeli kembali atau menjaga agar tidak kehabisan persediaan.

4. Administrasi asset tetap

Asset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam neraca diletakkan pada sisi asset di bawah persediaan. Aset tetap berpotensi menjadi modal dengan catatan data tentang setiap asset

yang dimiliki perusahaan tercatat dengan tertib dalam administrasi asset. Pencatatan atas asset tetap berfungsi untuk menunjukkan kapan barang tersebut dibeli kemudian digunakan untuk menentukan tingkat penyusutan dan mulai berlakunya serta waktu berakhirnya.

5. Administrasi Kas

Uang kas merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam neraca diletakkan pada sisi asset dan ditempatkan paling atas. Jumlah kas lazimnya tidak besar dan ketersediaanya secukupnya untuk mendukung kegiatan perasional sehari-hari. Uang tunai didalam kas perlu dijaga jumlah maksimalnya yakni sebesar kebutuhan operasional. Pencatatan uang kas sangat berguna dalam memberikan informasi tentang berapa jumlah uang kas yang masuk dan yang keluar sehingga menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.

6. Administrasi penggajian

Administrasi penggajian merupakan bagian dari manajemen personalia. Dalam system administrasi keuangan, administrasi penggajian masuk ke dalam kelompok biaya. Pencatatan tentang penggajian akan menginformasikan tentang jumlah biaya yang

dibayarkan untuk upah pegawai. Administrasi pengajian juga sebagai dasar dalam perhitungan pajak. Manfaat lainnya untuk menjaga keseimbangan antara perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan sehubungan dengan kinerja karyawan

7. Administrasi lainnya

Administrasi surat masuk, surat keluar, pencatatan tentang berbagai kebijakan perusahaan, administrasi sewa-menyewa asset, kerjasama serta kegiatan langsung yang dilakukan oleh perusahaan.

4. Bagi Hasil

Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan nama *profit sharing*. Muhammad mengemukakan tentang pengertian *profit sharing* adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹

Menurut Ferdiansyah dikutip dari jurnal Ferdiansyah, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga

dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama¹¹ atau dikenal dengan istilah *profit and lost sharing*.

Menurut Muhtasib yang dikutip dari jurnal Vidya Fatimah, pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan pada bunga bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha.¹

Dari beberapa pengertian bagi hasil diatas, peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antar bank syariah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Secara umum, prinsip bagi hasil disepakati oleh para ulama, yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Karena kedua akad ini paling sering dipakai. Sebernarnya ada dua akad yang lain dengan prinsip bagi hasil

¹¹ Ferdiansyah, "Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia)" , Jom Fekon, Vol. 2, No. 1. 2

yaitu *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun dua akad ini digunakan secara khusus untuk *plantation financing*.

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹²

5. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

¹² Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 34

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan orang *Hijaz* menyebutnya dengan istilah *qiradh*. *Qiradh* diambil dari kata *qath' u* yang berarti potongan, karena pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengelola dan pengelola akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh¹.

Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al-Jaziri, *Mudharabah* ialah ungkapan terhadap harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang digunakan sebagai modal usaha dan keuntungannya dibagi dua, dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pihak pemilik modal¹³.

Secara bahasa, *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. *Mudharabah* ini disebut juga dengan *qiradh* atau *muqaradah* yang berarti *al at' u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha. Istilah *Mudharabah* telah

¹³ Helmi Karim. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 11

dipopulerkan oleh ulama Iraq, sedangkan *qiradh* atau *muqaradhah* dipopulerkan oleh ulama Hijaz dan dari kedua istilah tersebut tidak ada perbedaan prinsip.¹

Secara mengatakannya bahwa *Mudharabah* adalah penyertaan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan bagian keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *Mudharabah* adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana atau modal yang sering juga disebut *shahibul mal*, menyediakan modal seluruhnya (100%) kepada pengelola modal yang dalam Islam disebut sebagai *mudharib*, untuk melaksanakan kegiatan produktif dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi dua antara mereka dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad¹⁴.

¹⁴Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 89

Secara umum para ulama *fiqh* menyatakan bahwa *Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama yang mencakup penyerahan modal dalam jumlah, jenis, dan kesepakatan tertentu yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola modal atau usaha untuk digunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dalam akad sebelumnya, namun apabila usaha tersebut tidak memiliki keuntungan dan menghasilkan kerugian maka kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan sebelumnya¹.

Mazhab Hanafi, *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Mazhab Maliki, *Mudharabah* adalah suatu pemberian modal atau (taukil) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan.

Mazhab Syafi' i, *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi anantara mereka berdua. Mazhab Hambali, *Mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹⁵

Landasan syariah yang dipakai oleh para ulama yang mengaplikasikan *Mudharabah* yaitu:¹

1. Al-Quran Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. Sebagaimana dalam

(Q.S. Al-Muzammil Surah Ke 73 Ayat20) sebagai berikut:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَأَقْرِضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua

¹⁵ Muhamad Al Imron, *implementasi prinsip akad Mudharabah pada PT asuransi takaful keluarga cabang malang*, skripsi fakultas syariah 2017

malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁶

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. al-Jumua' ayat 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ
عَرَاقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahan:

¹⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur' an dan Terjemahnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2010)

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam [125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. al-baqarah ayat 198)¹

2. Al-Hadits Dari Shalih Bin Suhaib ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

Sebagai mana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa yang dimaksud dengan *Mudharabah* ialah penanaman dana dari pemilik dana *shahibul maal* kepada pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi profit *and loss sharing* atau metode bagi pendapatan *revenue sharing* antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Kemudian penjelasan atas pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI2007 menjelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana *Shahibul maal* kepada pengelola dana *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Berbagai defenisi di atas dapat disimpulakn bahwa *Mudaharabah* bermakna

b. Macam-Macam *Mudharabah*

1) *Mudharabah Muthlaqah*.

Mudharabah muthlaqah adalah akad *Mudharabah* dimana *shahibulmaal* memberikan kebebasan kepada pengelodela dana (*mudharib*) dalam mengelola investasinya (PAPSI,2003).¹⁷ Dalam *Mudharabah Muthlaqah*, pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan ditempat mana saja yang dia inginkan. Dalam implementasinya *Mudharabah Muthlaqah* tidak diartikan kebebasan yang tanpa batas, karena tetap memperhatikan syarat-syarat yang lain

¹⁷ Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 86

yang diperbolehkan dalam Islam, misalnya tidak boleh membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

2) *Mudharabah Muqayyadah*.

Mudharabahmuqayyadah merupakan akad kerja sama antara dua pihak yang mana *shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atau penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasnya antara lain tentang:¹

- a) Tempat dan cara berinvestasi
- b) Jenis investasi
- c) Objek investasi
- d) Jangka waktu

Dalam *MudharabahMuqayyadah*, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. Misalnya, harus berdagang dengan jenis barang tertentu, dan membeli barang kepada orang tertentu. Dengan kata lain ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.

c. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip-prinsip *Mudharabah* secara khusus dibagi menjadi lima yaitu:¹⁸

1. Prinsip berbagi keuntungan (*profit sharing*) di antara pihak-pihak yang melakukan akad *Mudharabah*, dalam akad *Mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara *shaibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *Mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shaibul maal* sepenuhnya dikembalikan.
2. Prinsip berbagi kerugian (*profit loss sharing*) di antara pihak-pihak yang berakad, dalam *Mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib* (pengelola), sementara itu, pihak *mudharib* (pengelola) menanggung kerugian berupa waktu,

¹⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 81-83

tenaga, dan jerih payah yang dilakukan. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

3. Prinsip kejelasan dalam *Mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shaibul maal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjian harus disebutkan dengan tegas dan jelas, kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *Mudharabah*.
4. Prinsip kepercayaan dan amanah, masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *Mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *Shaibul maal* maka transaksi *Mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *Shaibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *Mudharabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.
5. Prinsip kehati-hatian, sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *Mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan

mengalami kerugian, di samping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.

3. Rukun *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad *Mudharabah*. Menurut jumhur ulama, ada tiga rukun *Mudharabah* antara lain:

1. Dua orang yang berakad yaitu pengelola modal (*mudharib*) dan orang yang mempunyai modal (*shahibul maal*).
2. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri atas modal (*maal*), kerja, keuntungan.
3. Shighat yakni serah (*ijab*) dan terima (*kabul*). Sedangkan menurut Mazhab hanafiyah, rukun *Mudharabah* hanya satu *ijab* (ungkapan penyerahan modal) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan ungkapan persetujuan kedua belah pihak).

Rukun tersebut wajib keberadaannya karena akan menjadi boleh atau tidaknya diteruskan perjanjian tersebut. Jika salah satunya tidak ada, maka akad tidak bisa terlaksana.

6. Pariwisata

Pengertian pariwisata adalah suatu gejala atau fenomena sosial yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, budaya, dan sebagainya yang merupakan kajian sosiologis. Pengertian umum kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengelola, dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata adalah suatu perpindahan sementara yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk keluar dari pekerjaan rutin, keluar dari tempat tinggalnya¹.

Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik tersendiri, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat. Desa wisata merupakan bentuk keterpaduan antara

atraksi, akomodasi dan fasilitas penunjang yang dijadikan suatu struktur kehidupan masyarakat yang terintegrasi dengan tata cara dan tradisi yang berlaku¹⁹.

Daya tarik wisata adalah sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan mengunjungi suatu tempat atau daerah, daya tarik tersebut biasanya berupa obyek-obyek yang jarang terjadi dan terlihat setiap hari¹.

Daya tarik objek wisata merupakan faktor utama pendorong pariwisata di suatu destinasi. Dengan kata lain, daya tarik suatu obyek wisata merupakan pendorong utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Potensi daya tarik wisata tersebut memiliki beberapa tujuan, yaitu:

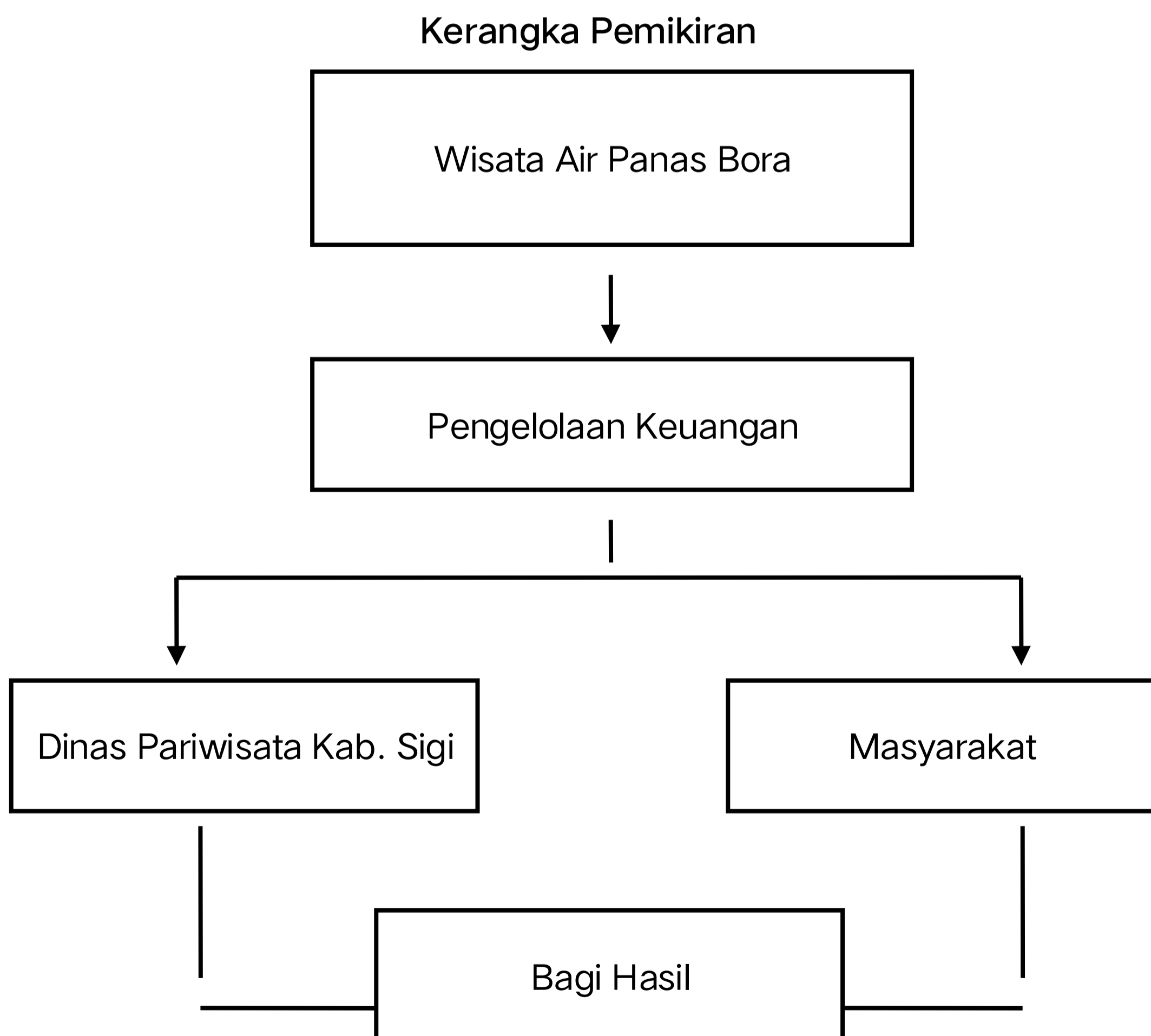
- a. Memperoleh manfaat baik dari segi ekonomi berupa devisa dan pertumbuhan ekonomi maupun dari segi sosial berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- b. Menghilangkan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan mengatasi pengangguran.

¹⁹ Nuryanti, Wiendu. Concept, Perspective and Challenges: *Bagian Dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya*. (Yogyakarta: UMPP, 1993), 12

- c. Memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat, sekaligus mengangkat citra bangsa dan memperkuat jati diri bangsa.
- d. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, serta mempromosikan budaya melalui pemasaran pariwisata.
Penguatan nilai-nilai agama, adat istiadat dan kehidupan masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Paradigma penelitian interpretatif berpandangan bahwa realitas sosial secara sadar dan secara aktif dibangun sendiri oleh individu, setiap individu mempunyai potensi memberi makna tentang apa yang dilakukan. Realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksional, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik serta tergantung pada orang yang melakukannya.¹

Oleh karena itu, suatu realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasi seperti halnya pada paradigma positivisme. Inti dari paradigma interpretatif adalah memahami bentuk fundamental dari dunia sosial pada tingkat pengamatan sosial dan tingkat pengalaman subjektif seseorang yang bersifat nominalis, antipositivis, voluntarisme dan ideografis.

B. Lokasi Penelitian

¹Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 26

Objek atau sasaran lokasi penelitian adalah wisata air panas Desa Bora. Ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian dianggap sangat representative terhadap judul proposal. Karena di samping objek yang dianggap tepat untuk melakukan penelitian, wisata air panas Desa Borabanyak dikunjungi oleh wisatawan.

C. Kehadiran Peneliti

Yang dilakukan terhadap objek di lokasi terjadi atau berlangsung peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diteliti. Sebelum mengadakan penelitian terlebih dahulu Penulis menyampaikan kehadiran penelitian di lokasi penelitian mutlak adanya sebagai upayah untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat dan objektif di lapangan.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.”¹

Lebih lanjut menurut “Burhan Bungin” ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga diantara yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan suatu situasi ke situasi lainnya.

Jenis data yang dikumpulkan oleh Penulis terbagi dalam dua jenis yaitu: sumber datanya adalah data primer dan data sekunder yang dimaksud dengan data primer yaitu sumber data yang langsung dan segera diperoleh Penulis untuk tujuan yang khusus. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang dilaporkan oleh orang luar selain dari Penulis sendiri. Adapun sumber data yang diambil adalah sebagai informal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Pormat-Format Kualitatif dan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya ; Cet, 1 : Air Langga University Press, 2001, h. 129

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.¹ Pada tahap ini adalah tahap pertama yang penulis gunakan. Dengan mengadakan observasi menurut kenyataan dan menggambarkan secara cermat untuk mendapatkan data yang relevan. Metode observasi disini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan, sebagai bahan untuk obyek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ialah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).

Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap *interviewer* harus mampu menciptakan hubungan baik dengan *interviewee* atau responden atau mengadakan *raport*, yaitu situasi psikologi yang menunjukkan bahwa responden bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberikan informasi sesuai

dengan pikiran serta memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.³

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, perangkat Desa Bora dan masyarakat sekitar Desa Bora.

c. Dokumentasi

Teknik lain yang dapat digunakan penulis selama mengadakan penelitian untuk memperoleh data di lapangan adalah menghimpun dokumen-dokumen atau uraian-uraian tersebut. Serta dalam teknik dokumentasi ini penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar dilakukan di lokasi dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan Penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain:

a. Reduksi Data

³ Nurul Zariah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 179

Yaitu penulis menganalisis data dengan cara memilih serta menentukan data dan keterangan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini. mengklasifikasikan berarti memilih-milih (mengelompokkan seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan kemudian membandingkan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Kemudian hasil pemaknaan ini direduksi dan kemudian akan disajikan sesuai dengan uraian dalam fokus atau masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia. Selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian di lapangan.

c. Verifikasi Data

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan proposal ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembagian terhadap data itu.¹

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran ala sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder*. Kebenaran bukan saja muncul dari wacana etik, namun juga menjadi wacana etik dari masyarakat yang diteliti.⁴

Ada 4 jenis penyajian triangulasi sebagai berikut:¹

a. Triangulasi Data (*Data Triangulation*)

⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 205

Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Ada 3 sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang.

- 1) Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas sama.
- 2) Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda.
- 3) Ruang, data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda.

Bentuk paling kompleks triangulasi data yaitu menggabungkan beberapa sub-tipe atau semua level analisis. Jika data-data konsisten, maka validitas ditegakkan.

b. Triangulasi Antar-Peneliti (*Multiple Researchers*)

Pelibatan beberapa peneliti berbeda dalam proses analisis. Bentuk kongkrit biasanya sebuah tim evaluasi yang terdiri dari rekan-rekan yang menguasai metode spesifik ke dalam Focus Group Discussion (FGD). Triangulasi ini biasanya menggunakan profesional yang menguasai teknik spesifik dengan keyakinan bahwa ahli dari teknik berbeda membawa perspektif berbeda. Jika setiap evaluator menafsirkan sama, maka validitas ditegakkan.

c. Triangulasi Teori (*Theory Triangulation*)

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data.

Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan

pemahaman yang lebih baik saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka validitas ditegakkan.

d. Triangulasi Metodologi (*Methodological Triangulation*)

Pemeriksaan konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda seperti penggabungan metode kualitatif dengan data kuantitatif atau melengkapi data wawancara dengan data observasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Luas wilayah desa Bora sebesar 65.02 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Desa Bora

NO	Nama Wilayah	Luas	Satuan
1.	Permukiman	27	Ha
2.	Pertanian sawah	23	Ha
3.	Lading/tegalan	-	Ha
4.	Hutan	6	Ha
5.	Rawa – rawa	-	Ha
6.	Perkantoran	2,05	Ha
7.	Sekolah	1	Ha
8.	Jalan	2.04	Ha
9.	Lapangan sepak bola	1	Ha

Sumber: Dana Desa APBDes 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah digunakan untuk pertanian sawah seluas 23 ha, kemudian untuk permukiman seluas 27 ha, untuk jalan 2,04 ha, sekolah 1 ha, lapangan epakbola 1 ha dan perkantoran 2,05 ha.

Tabel 4.2
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Nama	Jumlah	Satuan
1	Kepala Keluarga	674	KK
2	Laki-laki	1.229	Orang
3	Perempuan	1.165	Orang
	Jumlah	2.968	Orang

Sumber: Dana Desa APBDes 2022

Berdasarkan data di atas Desa Bora memiliki 674 kepala keluarga dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.229 dan perempuan sebanyak 1.165 orang.

Tabel 4.2
Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Satuan
1	SD/MI	377	Orang
2	SLTP/MT	227	Orang
3	SLTA/MA	234	Orang
4	SI/Diploma	85	Orang
5	TK	98	Orang
6	Belum tamat SD	108	Orang
7	Belum Sekolah	93	Orang
8	Tidak Pernah Sekolah	134	Orang
9	JUMLAH	1356	Orang

Sumber: Dana Desa APBDes 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagai besar penduduk Desa Bora memiliki tingkat pendidikan SD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah.

Tabel 4.3
Jenis Ternak

No	Jenis	Jumlah	Satuan
1.	Kambing	200	Ekor
2.	Sapi	500	Ekor
3.	Kerbau	-	Ekor
4.	Ayam	700	Ekor
5.	Itik	400	Ekor
6.	Burung	-	Ekor
7.	Babi	-	Ekor

Sumber: Dana Desa APBDes 2022

Sektor peternakan di Desa Bora didominasi oleh ternak ayam sebanyak 700 ekor, itik 400 ekor, kambing 200 ekor dan sapi 500 ekor.

Tabel 4.4
Jenis Perikanan

No	Jenis perikanan	Luas	Satuan
1.	Tambak ikan	-	Ha
2.	Tambak udang	-	Ha
3.	Lain-lain	-	Ha

Sumber: Dana Desa APBDes 2022

Sektor perikanan di Desa Bora tidak ada baik tambak ikan, udang dan lain sebagainya.

1. Struktur mata pencaharian

Tabel 4.5
Mata Pencarian

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah	Satuan
1.	Petani	288	Orang
2.	Pedagang	30	Orang

3.	PNS	29	Orang
4.	Tukang	84	Orang
5.	Guru	30	Orang
6.	Bidan/perawat	4	Orang
7.	Pensiun	5	Orang
8.	Pensiun	-	Orang
9.	Sopir/angkutan	5	Orang
10.	Buruh	98	Orang
11.	Asa persewaan	1	Orang
12.	Swasta	-	Orang

Sumber: Dana Desa APBDes 2022

Penduduk Desa Bora yang memiliki mata pencarian sebagai petani sebanyak 288 orang, pedagang 30 orang, PNS 29 orang, tukang 84 orang, guru 30 orang, bidan 4 orang, sopir 5 orang, buruh 98 orang, dan persewaan 1 orang.

4.1.1 Kondisi Pemerintahan Desa

Tabel 4.5
Jumlah Aparat Desa

No.	Aparat desa	Jumlah	Satuan
1.	Kepala desa	1	Orang
2.	Sekretaris desa	1	Orang
3.	Perangkat desa	14	Orang

4.	BPD	5	Orang
----	-----	---	-------

Sumber: Dana Desa APBDes 2022

Jumlah aparat desa di Desa Bora sebanyak 14 orang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa 1, 14 orang perangkat desa dan 5 orang BPD.

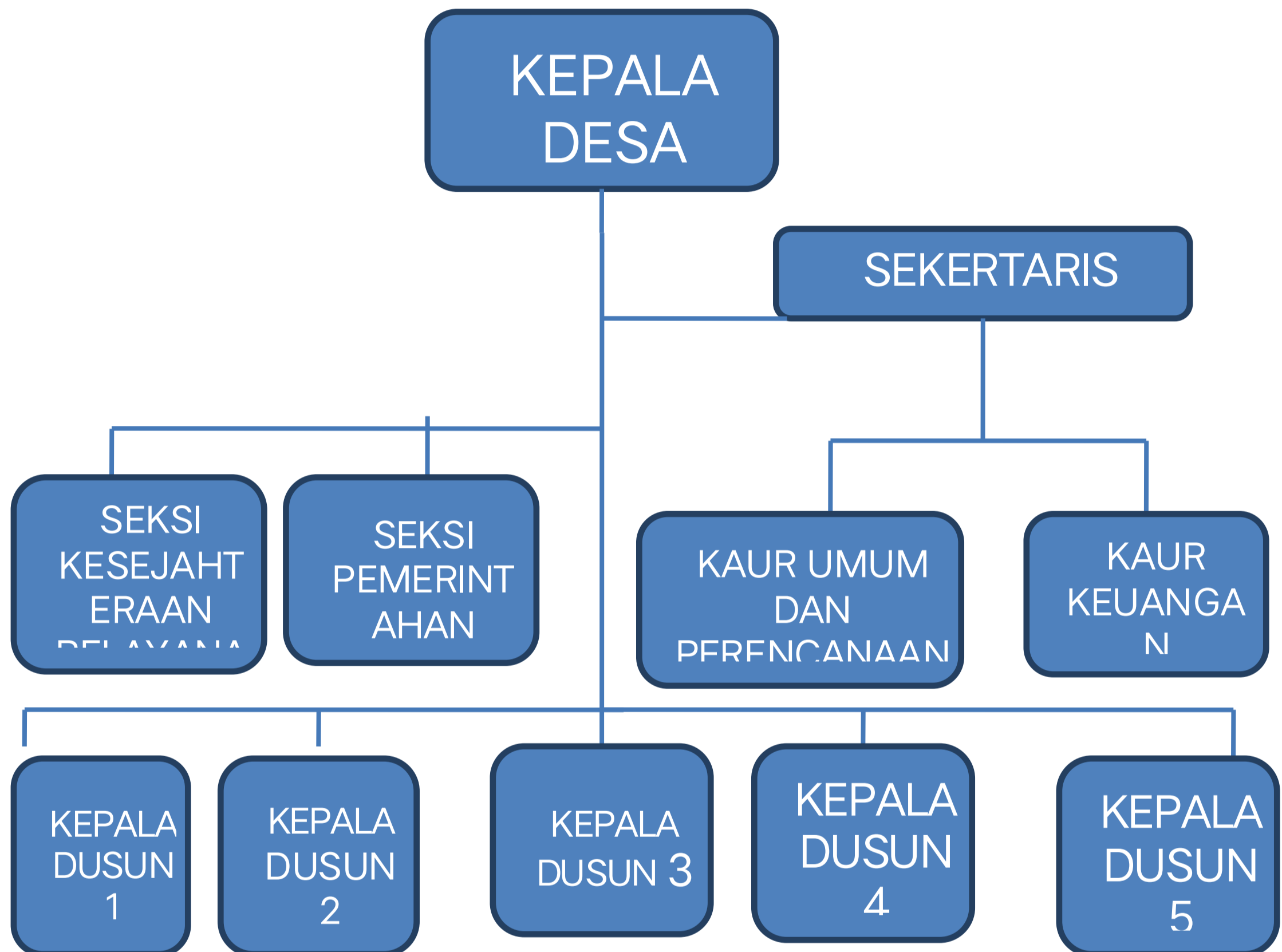
Tabel 4.6
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

No.	Nama lembaga	Jumlah	Satuan
1.	LPMD	6	Orang
2.	PKK	20	Orang
3.	Posyandu	1	Unit
4.	Arisan	2	Kelompok
5.	Simpan pinjam	1	Kelompok
6.	Kelompok tani	11	Kelompok
7.	Gapokan	1	Kelompok
8.	Karang tarunan	1	Kelompok
10.	Ormas/LSM	-	Kelompok
11.	Lain-lain	-	Kelompok

Sumber: Dana Desa APBDes 2022

Berdasarkan data di atas diatas jumlah anggota LPMD sebanyak 6 orang, kemudian anggota PKK sebanyak 20 orang, posyandu 1 unit, arisan 2 kelompok, simpan pinjam 1 kelompok, kelompok tani 11 kelompok, gapoktan 1 kelompok dan risma 2 kelompok.

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan

kinerjanya. Berikut Struktur Pemerintahan Desa yang ada beserta tugas dan fungsinya:

1. Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.¹

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.¹

3. Kepala Kasi Pemerintahan

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi

¹ Kantor Desa Bora, 2023

melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.²

4. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.¹

5. Kaur Keuangan

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.³

6. Kaur Umum dan Perencanaan

² Ibid

³ Ibid

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.¹

4.1.6 Visi Dan Misi

Visi: Dengan semangat pengabdian pembangunan desa Bora demi menuju cita-cita terwujudnya desa Bora yang sejahtera, bertoleransi, berbudaya dan mandiri berbasis peningkatan hasil pertanian, perkerbunan serta bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.

MISI:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang masih minim atau rendah dibidang pertanian, perternakan, perkebunan, dan industry atau usaha kecil melalui pemberdayaan dengan metode pelatihan.
2. Meningkatkan saran dan prasarana desa yang sumber dananya yang sudah jelas dari daerah atau pusat, dan
PAD

3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan peningkatan produktifitas hasil pertanian (sawah) pemasaran, pinjaman modal usaha (BUMDes)
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kerja sama antar lembaga pemerintah didesa dan lembaga lainnya
5. Dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintah didesa berdasarkan keterburukan, kejujuran, transparansi, kebijakan dan jiwa pengabdian yang setulus-tulusnya lahir dan batin, demi kejayaan desa dan untuk kita semua
6. Menjlankan atau melaksanakan PERDES berdasarkan PERDA sesuai kemauan dan kesadaran masyarakat menuju kemandirian desa kita bersama
7. Kami berjanji akan berkerja sesuai kemampuan dan atas dasar dukungan, dan partisipasi seluruh masyarakat
8. Kesemuanya itu kembali kemasyarakat dengan penuh ketuasan dan kedadaran untuk menuju kedepan nasib yang lebih baik atas Desa kita.
9. Kami sangat menerima kritik dan saran dengan sepenuh hati demi melangkah kedepan yang lebih baik

10. Kami berterimakasih dan menyukuri atas pengabdian serta kinerja para kepala desa dan perangkat terdahulu.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dalam Skema Bagi Hasil Pada Wisata Air Panas Desa Bora

Masyarakat adalah suatu sistem sosial yang secara sadar atau tidak sadar akan mengalami perubahan sosial. Terjadinya perubahan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dengan adanya penemuan-penemuan baru, hasrat ingin maju, dan lain-lain. Masyarakat desa Bora umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Semenjak adanya pengembangan wisata air panas Bora mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Bora dalam berbagai segi kehidupan dapat dilihat dari; pertama adalah penerimaan terhadap unsur-unsur baru yaitu baralihnya mata pencaharian dari petani menjadi pelayan jasa pariwisata, dari petani menjadi pedagang. Kedua adalah menerima adanya akulturasi yaitu dapat berbaur dengan masyarakat yang datang dari luar (wisatawan).

Ketiga adalah menerima adanya perubahan kebiasaan hidup dari tradisional ke modern.

Manusia pada hakikatnya memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Telah menjadi kodrat dan fitrah manusia, bahwa manusia lahir sebagai makhluk sosial yang senantiasa bergaul dan melakukan hubungan satu sama lain. Sehingga terjadilah sistem bantu-membantu dan tolong-menolong demi untuk mengisihidup dan kehidupan dalam berbagai aspek. Kawasan wisata air panas Bora juga terdapat berbagai komunitas atau perkumpulan masyarakat seperti kelompok para perempuan, kelompok keagamaan, kelompok kesenian, dan kelompok tani. Dengan adanya kelompok ini tentu sangat membantu para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama dalam hal sosial dan ekonomi. Mulai dari kegiatan wirausaha, bekerja sama dalam kegiatan yang diadakan, saling membantu satu sama lain, serta bekerja sama untuk menarik wisatawan berkunjung ke wisata air panas Bora.

Berikut adalah uraian Kepala Desa Bora:

“Dengan adanya objek wisata ini jadi sering bertemu dengan orang luar bisa membangun hubungan keluarga dengan siapa saja, dengan adanya wisata semakin meningkatkan hubungan kerukunan serta keamanan, kesejahteraan masyarakat desa. Objek wisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat

seperti pemilik lahan dan warga yang ingin berjualan. Mereka dapat memperoleh tambahan pendapatan”⁴.

Kepala Desa Bora menjelaskan bahwa adanya wisata air panas Bora meningkatkan kerukunan serta keamanan masyarakat desa dengan seringnya bertemu orang luar (wisatawan) membuat mereka dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dalam kesempatan lain peneliti juga menanyakan hal yang serupa kepada penanggungjawab yang bekerja di wisata air panas Bora:

“Betul, disini ada kelompok-kelompok desa dan menurut saya ini bagus yah menjaga hubungan baik sesama masyarakat, saling bekerja sama juga. Dengan adanya kelompok desa dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi”¹.

Berikut adalah uraian Kepala Desa Bora:

“Jelas ada perubahan bagi mereka yang memanfaatkan potensi wisata ini sebagai sumber pendapatan masyarakat. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya ada pemilik lahan dan warga yang berjualan, mereka bias mendapatkan tambahan pendapatan”⁵

Perubahan dirasakan oleh mereka yang melibatkan diri dalam aktivitas wisata, pemilik membuat pendapatan mereka meningkat. Hal serupa ditanyakan kepada penanggungjawab yang bekerja di wisata air panas Bora:

⁴ Kepala Desa Bora, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023

⁵ Kepala Desa Bora, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023

“Sudah lama saya bekerja disini dari tahun 2017 sampai sekarang, karena ada peluang kerja yang dekat kenapa tidak kan. Saya sudah menjadi pegawai tetap disini tentunya sangat membantu untuk kebutuhan hidup apalagi untuk keluarga juga, sudah bisa untuk keperluan yang lain, jadi sudah ada pekerjaan begini tidak terlalu pusing dalam masalah kebutuhan ekonomi” .¹

Pemilik Lahan mengatakan bahwa:

“tidak ada kejelasan pembagian pendapatan seperti yang diungkapkan sebelumnya. Pemerintah daerah terkesan tidak menghiraukan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Kami sudah sering mengingatkan mengenai kesepakatan yang telah dbuat, walaupun hanya secara lisan namun itu adalah bentuk kesepakatan” .⁶

Pemilik lahan menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan lahan sendiri seharusnya pembagian bagi hasil dilakukan secara transparan. Karena untuk mengharapkan hasil dari berkebun itu tidak akan cukup jadi pemilik lahan juga mengupayakan untuk mendapatkan tambahan pendapatan untuk biaya hidup walaupun pendapatan yang tidak menentu tiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan di wisata ini mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat desa Bora khususnya pemilik lahan.

Potensi alam yang ada seperti wisata air panas Bora dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat sekitarnya. Tentu saja ini sangat berguna bagi masyarakat sekitarnya

⁶ Pemilik Lahan, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023

dalam hal terciptanya peluang kerja dan juga bertambahnya pendapatan.

Pada sesi wawancara pada salah satu informan yaitu pengelola Dinas Pariwisata menyatakan bahwa bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan.

“kami membagi pendapatan sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar 60 persen untuk Dinas Pariwisata dan 40 persen untuk pemilik lahan namun terkadang pemilik lahan menilai kami tidak transparan, namun kami memiliki catatan pemasukan” .¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara pemilik lahan dengan pengelola wisata air panas Bora. Pengelola mengemukakan bahwa bagi hasil sudah sesuai dengan kesepakatan.

1. Prinsip Berbagi Keuntungan (profit sharing)

Dalam hal perjanjian kerjasama pengelolaan wisata desa air panas Bora dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, idealnya menggunakan perjanjian bagi hasil dengan pembagian keuntungan bersih setelah dipotong biaya operasional.

Seperti yang diungkap oleh pengelola wisata air panas Bora bahwa:

“Untuk menetapkan bagi hasil, pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan

yang akan didistribusi. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil. Prinsip perhitungan bagi hasil penting ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua pihak untuk melaksanakan kesepakatan, apabila tidak dikatakan, maka akan menjadi gharar sehingga tidak sesuai dengan syariah” .⁷

Sejalan dengan pernyataan pengelola wisata air panas Bora, pemilik lahan mengungkapkan bahwa:

“yang saya tau kalau bagi hasil itu dibagi sesuai dengan perjanjian, saya hanya mendengar dari teman-teman. Kalau kita ini yang penting setiap bulan ada pembagian yang jelas” .¹

Prinsip dasar dalam syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini didasarkan pada prinsip agama islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang diharamkan dalam agama Islam. Hal ini kemudian diimplikasikan dalam *shariah enterprice theory* dimana *shariah enterprice theory* ini dikembangkan berdasarkan karakteristik keseimbangan yang mengandung nilai egoistic-altruistik, material-spiritual, individu-jama’ ah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan *shariah enterprice theory* tidak hanya peduli pada kepentingan individu dalam hal ini pemegang saham, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *shariah enterprice*

⁷ Pengelola Wisata Air Panas Bora, Wawancara Tanggal 26 Juli 2023

theory memiliki kepedulian yang besar terhadap stakeholder yang luas meliputi Tuhan, manusia dan alam⁸.

Kepedulian *stakeholder* merupakan sisi keseimbangan kreativitas yang merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi (khalifatul fill ardh). Disisi lain *shariah enterprice theory* memiliki pertanggung jawaban dari sisi ketundukan dan kepatuhan menjalankan syariah islam yang merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai abdi Allah (Abd' Allah). Ketundukan manusia diharapkan berdampak pada terpenuhinya tujuan syariah bahwa setiap penciptaan, hasil dan distribusi kesejahteraan harus memenuhi kriteria halal, thoyib dan bebas riba.¹ Terkait dengan kepatuhan menjalankan hukum islam merupakan tujuan dari akuntansi syariah itu sendiri seperti yang di ungkap oleh Saiful Muckhlis bahwa: “Tujuan akuntansi syariah adalah realisasi kecintaan utama kepada Allah SWT. dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas atas transaksitransaksi ekonomi dalam sebuah entitas yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan tujuan syariat” . *Shariah enterprice theory* menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, sehingga tali

⁸ Syefei Antonio, bank syariah dari teori ke praktik (Jakarta, 2001), h.23

penghubung antara akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran keTuhanan para pengguna tetap terjamin.⁹

2. Prinsip Berbagi Kerugian (*profit loss sharing*)

Dalam kerja sama apapun pada dasarnya tidak selalu untung, namun ada juga yang mengalami kerugian, baik karena kesalahan dari pihak pengelola maupun lainnya. Dalam praktik kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan objek wisata ini pun juga ada pro dan kontranya antara kedua belah pihak karna sering terjadi kerusakan spot wisata dan kerugian ditanggung pemilik lahan untuk memperbaiki kerusakan.

Seperti yang diungkapkan pemilik lahan berikut:

“biasanya kalau ada kerusakan kami yang memperbaiki, kami berkoordinasi dengan pihak pengelola namun biasanya karena responnya lambat, kami perbaiki sendiri. Seperti kolam dan toilet, itu kami perbaiki sendiri” .¹

Kerja sama pengelolaan obyek wisata air panas Bora mengenai penanggunggan kerugian belum sesuai dengan akad mudarabah. Dalam pelaksanaan akad mudharabah pada dasarnya kedua belah pihak belum paham dan mengerti mengenai akad kerja sama dalam Islam dengan benar.

⁹ Ibid

Dalam fiqh Umar telah dijelaskan bahwa kerugian ditanggung sendiri oleh pihak pemilik modal atau pengelola. Dalam sebuah perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal dan penyewa pada dasarnya masih belum sesuai dengan hukum Islam. Karna syarat dan ketentuan hanya ditentukan salah satu pihak. Dalam sebuah perjanjian kerugian seharusnya ditanggung bersama-sama. Kerja sama pengelolaan obyek wisata bisa dikatakan selesai apabila salah satu berhenti tidak mengelola lagi karena talang wisata tersebut adalah lahan pemerintah yang dikelola untuk perbaikan ekonomi mengingat di Pringsewu masing jarang tempat wisata alam yang asri dan untuk member pekerjaan kepada warga sekitar talang yang menganggur mengingat sulitnya mencari pekerjaan jadi denga adanya talang indah itu bisa membantu perekonomian selagi kerja sama antar pihak sesuai dan keuntungan dibagi dan kerugian yang tidak ditanggung hanya sebelah pihak saja. Namun, yang terjadi disini sering kali kerusakan justru bukan ditanggung bersama. Jadi dalam penjelasan di atas kerjasama pengelolaan objek wisata ini belum sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada keselarasan antara dalil dan pelaksanaan kerjasama tersebut

Hal ini sesuai dengan temuan Burhanuddin dan Abdullah yang menyatakan bahwa belum ada perjanjian yang mendeskripsikan serta membahas secara detail mengenai *loss sharing* (bagi rugi) dalam kaitannya dengan proses akad di pengelolaan wisata sebagaimana implementasi yang telah diberlakukan dalam akad mudharabah.

3. Prinsip Kejelasan Dalam Mudharabah

Kejelasan merupakan unsur penting dalam sebuah perjanjian. Pengelolaan keuangan wisata air panas Bora belum memenuhi prinsip kejelasan. Hal pertama yang dapat dilihat adalah tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan. Kemudian tidak adanya kejelasan mengenai penentuan pembagian kerugian.

Pemilik Lahan mengatakan bahwa:

“tidak ada kejelasan pembagian pendapatan seperti yang diungkapkan sebelumnya. Pemerintah daerah terkesan tidak menghiraukan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya”¹⁰

Pemilik lahan menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan lahan sendiri seharusnya pembagian bagi hasil dilakukan secara transparan. Karena untuk mengharapkan hasil dari berkebun itu tidak akan cukup jadi pemilik lahan juga mengupayakan untuk mendapatkan tambahan pendapatan untuk biaya hidup walaupun pendapatan yang tidak

¹⁰ Pemilik Lahan, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023

menentu tiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan di wisata ini mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat desa Bora khususnya pemilik lahan.

Potensi alam yang ada seperti wisata air panas Bora dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat sekitarnya. Tentu saja ini sangat berguna bagi masyarakat sekitarnya dalam hal terciptanya peluang kerja dan juga bertambahnya pendapatan.

Pada sesi wawancara pada salah satu informan yaitu pengelola Dinas Pariwisata menyatakan bahwa bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan.

“kami membagi pendapatan sesuai dengan kesepakatan namun terkadang pemilik lahan menilai kami tidak transparan, namun kami memiliki catatan pemasukan”¹.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara pemilik lahan dengan pengelola wisata air panas Bora. Pengelola mengemukakan bahwa bagi hasil sudah sesuai dengan kesepakatan.

Setiap manusia mempunyai takaran kepuasan masing-masing dalam mengkonsumsi pendapatannya. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa salah satu hal yang membuat masyarakat melakukan aktivitas

di wisata air panas Bora adalah untuk memperoleh pendapatan sebagai bentuk rasa aman dari masalah ekonomi. Mereka merasa tidak puas dengan hasil yang mereka dapatkan dari hasil lahan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi.

Kepala Desa menjelaskan bahwa wisata air panas Bora berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang berdagang atau pemilik lahan, sedangkan pendapatan yang diperoleh di wisata air panas Bora itu sepenuhnya langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan bukan Pemerintah Desa. Dan untuk sampai saat ini belum ada pemberian dana serta keterlibatan pemerintah Desa Bora dalam pengelolaan wisata tersebut.

4. Prinsip Kepercayaan Dan Amanah

Setiap manusia mempunyai takaran kepuasan masing-masing dalam mengkonsumsi pendapatannya. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa salah satu hal yang membuat masyarakat melakukan aktivitas di wisata air panas Bora adalah untuk memperoleh pendapatan sebagai bentuk rasa aman dari masalah ekonomi. Mereka merasa tidak puas dengan hasil yang mereka dapatkan dari hasil lahan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi.

Kepala Desa menjelaskan bahwa wisata air panas Bora berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang berdagang atau pemilik lahan, sedangkan pendapatan yang diperoleh di wisata air panas Bora itu sepenuhnya langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan bukan Pemerintah Desa. Dan untuk sampai saat ini belum ada pemberian dana serta keterlibatan pemerintah Desa Bora dalam pengelolaan wisata tersebut.

Hal serupa ditanyakan kepada penanggungjawab yang bekerja di wisata air panas Bora menyatakan bahwa dana yang dikumpulkan di wisata air panas Bora itu dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, sebagai berikut:

“Dana semua di setor ke pemerintah daerah jelas itu untuk pembangunan daerah, seminggu sekali di setor ke pusat pendapatan daerah lewat Bank Sulteng. Mulai dari penjualan karcis, parkir, dan penggunaan fasilitas umum yang disediakan itu semua dananya di setor kepada pusat pendapatan daerah” .¹¹

Berdasarkan penjelasan informan di atas, bahwa semua dana yang dihasilkan di wisata air panas Bora itu disetor ke Pusat Pendapatan Daerah dan langsung dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi untuk pembangun daerah. Dengan adanya wisata ini

¹¹ Pengelola Wisata Air Panas Bora, Wawancara Tanggal 26 Juli 2023

membantu dirinya serta, masyarakat sekitar kawasan wisata dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang ada.

5. Prinsip Kehati-Hatian

Syariah Islam berkeyakinan dalam sistem konvensional terdapat unsur ketidakadilan seperti yang diterapkan, sebaliknya sistem bagi hasil yang diterapkan merupakan sistem ketika pengelola dana dan penyedia dana berbagi dalam resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Terkait pembagian dalam nisbah mudharabah haruslah berdasarkan kesetaraan kesempatan dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi masing-masing dalam bentuk kontribusi dan tanggung jawab yang dibebankan.

Berikut hasil wawancara dengan pihak pengelola wisata air panas

Bora:

“kami selalu memberikan informasi kepada pemilik lahan mengenai keluar masuknya uang, kami membagi sesuai dengan kesepakatan namun terkadang beberapa pemilik lahan kurang terima”¹.

Hal berbeda disampaikan oleh pemilik lahan:

“perjanjian yang dilakukan kadang tidak selalu ditepati, ada beberapa pendapatan yang kami rasa janggal” .

Dalam perjanjian ini pemilik lahan memberikan kuasa penuh kepada Dinas Pariwisata untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata di Kawasan Wisata Air panas Bora dengan prinsip bagi hasil.

Perjanjian kerjasama antara pihak yang mempunyai lahan dengan pihak pengelola kawasan wisata Air panas Bora telah menyepakati ketentuan yang telah dibuat dalam hal kerjasama untuk melakukan sesuatu. Pasal tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Maka dalam perjanjian antara pihak yang mempunyai lahan dengan pihak pengelola kawasan wisata Air panas Bora yang dilakukan secara tidak tertulis ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian yang dilakukan antara pihak yang mempunyai lahan dengan pihak pengelola kawasan wisata Air panas Bora berupa penyediaan lahan oleh pihak pengelola untuk pembuatan infrastruktur yang terdiri dari pembuatan WC umum, lahan yang disediakan oleh pengelola untuk UMKM berjualan serta menyediakan lahan parkir yang aman untuk wisatawan.

Dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, mereka menyepakati untuk bagi hasil sesuai pendapatan yang didapatkan dari pengelolaan kawasan wisata Air panas Bora tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kawasan Air panas

Bora menyatakan bahwa pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi pernah memberikan proposal kerjasama, namun tidak ada tindakan lebih lanjut atas hal ini.

Dalam proposal kerjasama ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi membuat rancangan mengenai pengembangan kawasan wisata ini. Perencanaan yang dimaksudkan berupa peningkatan fasilitas umum, dan akses menuju lokasi, serta pemberdayaan UMKM yang ada di kawasan wisata ini. Namun demikian, rencana kerjasama ini belum direalisasikan hingga saat ini.

2. Faktor Penghambat Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Wisata Air Panas Desa Bora

Pelaksanaan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sigi masih mengalami beberapa hambatan, begitu juga dengan kawasan wisata air panas Bora. Masih terdapat beberapa kendala yang dialami dalam proses kerjasama antara dinas pariwisata dan masyarakat. Berikut ini dipaparkan faktor yang melatarbelakangi terhambatnya kegiatan pengelolaan pariwisata di Wisata air panas Bora:

1. Minimnya Anggaran

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang sekarang sangat di perhatikan oleh pemerintah untuk dikelola secara terus

menerus, selain menambah pendapatan daerah di sisi lain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun anggaran pemerintah dalam rangka pengembangan pariwisata relative tidak stabil sehingga pengelolaan industry pariwisata menjadi terkendala. Pengelolaan pariwisata yang bersumber dari APBD tentu tidak seluruhnya di alokasikan kepada kegiatan pengembangan atraksi wisata. Persoalan tersebut kemudian memicu kendala dalam proses pengelolaan wisata air panas Bora.

“Yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan kawasan objek wisata ini yaitu terkendala masalah anggaran yang terbatas dikarenakan banyaknya tempat wisata yang masih membutuhkan anggaran juga makanya pemerintah daerah itu memilah mana yang penting untuk di kembangkan”¹²

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu masalah anggaran yang dimana anggaran tersebut sangat terbatas sehingga menyebabkan pembangunan tempat wisata belum bisa dilakukan secara maksimal dan perlu tahapan-tahapan. Sehingga pembangunan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan merata.

Program pengembangan destinasi wisata dimana dalam peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata, dan pemasaran

¹² Pengelola Wisata Air Panas Bora, Wawancara Tanggal 26 Juli 2023

pariwisata terbentur alokasi dana. Hal ini mengakibatkan belum semuanya sarana dan prasarana di destinasi wisata dalam keadaan baik dan juga program pemasaran pariwisata belum berjalan maksimal. Permasalahan tersebut menuntut pemerintah untuk lebih mempertimbangkan pengelolaan anggaran dalam membangun industry pariwisata.

Minimnya anggaran untuk pengelolaan pariwisata menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi dalam rangka mengembangkan objek wisata air panas Bora sebagai salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Sigi.

Sementara itu Kepala Desa Bora menyebutkan akan adanya penambahan anggaran untuk alokasi pengelolaan wisata air panas Bora di Tahun 2024. “ Insyallah di tahun depan objek wisata Wisata air panas Bora akan menjadi prioritas utama pembangunan kawasan objek wisata dan akan dimasukkan didalam penganggaran di tahun 2022 yang akan datang.

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pemerintah Kecamatan Bone-Bone sangat serius dalam mengembangkan objek wisata air panas Bora dimana untuk tahun mendatang objek

wisata tersebut akan masuk penganggaran untuk meningkatkan pengelolaannya.

2. Minimnya sarana dan prasarana

Pengembangan pariwisata khususnya sarana dan prasarana pariwisata merupakan sebuah proses peningkatan nilai dalam berbagai aspek bidang pariwisata terutama ketersediaan objek daya tarik wisata serta sarana dan prasarana. Pariwisata berkelanjutan mengarah pada pengelolaan seluruh sumberdaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, estetika dapat terpenuhi sekaligus memelihara keberlanjutan sosial budaya, ekosistem, dan sistem penopang keberlanjutan makhluk hidup. Sebuah objek wisata tentu harus memiliki fasilitas yang lengkap guna memuaskan kunjungan wisatawan. Masih banyak fasilitas yang masih minim di kawasan wisata air panas Bora salah satunya tempat untuk mengganti pakean bagi pengunjung.

“Masih kurangnya fasilitas penunjang seperti ruang ganti pakaian, karena apabila habis sudah berenang pusing miki dimana mau ganti pakaian. Jadi terpaksa dipakai basah saja pakaian kalau mau pulang.”¹

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan adanya ketidaknyamanan dari masyarakat ketika berkunjung kelokasi wisata

wisata air panas Bora dimana tempat untuk berganti pakean sehabis mandi masih sangat minim yang menjadikan pengunjung merasa kurang nyaman.

Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kuantitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Kebutuhan wisatawan akan fasilitas yang memadai menjadi salah satu daya tarik dari sebuah wisata. Wisata air panas Bora dalam pengelolaannya memang masih sangat minim sarana dan prasarana terlebih hal tersebut tidak ada retribusi yang di tarik pemerintah dari pengunjung.

“Kalau saya liat ditempat wisata pada umumnya bagus dan banyak fasilitasnya karena ada uang karcis masuk. Nahh di Wisata air panas Bora itu tidak ada gratis.”¹³

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan belum adanya retribusi dari kegiatan pariwisata wisata air panas Bora menjadi salah satu penyebab belum memadai sarana dan prasarana pada objek

¹³ Pemilik Lahan, Wawancara Tanggal 25 Juli 2023

wisata tersebut. Pemerintah menyebutkan terlebih dahulu menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan baru menarik pendapatan dari kegiatan wisata.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait faktor penghambat pengelolaan permandian wisata air panas Bora dapat dilihat dari minimnya anggaran dan kurangnya sarana dan prasarana. Anggaran pengelolaan pariwisata yang bersumber dari APBD masih sangat minim dalam rangka pengembangan infrastruktur dari wisata air panas Bora yang berdampak kepada kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas penunjang bagi wisatawan yang ingin melakukan kegiatan wisata.

Dengan belum terlibatnya masyarakat secara maksimal didaerah kawasan wisata menyebabkan potensi alam dan potensi masyarakat pada kawasan wisata Air panas Bora kurang menarik bagi wisatawan, dan minat wisatawan untuk berkunjung cenderung menurun. Faktor penyebab menurunnya kunjungan wisata menuju objek wisata Air panas Bora dipengaruhi oleh beberapa masalah sosial pada kawasan tersebut, yang tidak diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut. Masalah sosial yang umumnya terjadi pada kawasan ini seperti munculnya pungutan liar.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam skema bagi hasil pada Wisata Air Panas Desa Bora belum sesuai dengan perjanjian. perjanjian antara pihak yang mempunyai lahan dengan pihak pengelola kawasan wisata Air panas Bora yang dilakukan secara tidak tertulis ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kerja sama apapun pada dasarnya tidak selalu untung, namun ada juga yang mengalami kerugian, baik karena kesalahan dari pihak pengelola maupun lainnya. Dalam praktik kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan objek wisata ini pun juga ada pro dan kontranya antara kedua belah pihak karna sering terjadi kerusakan spot wisata dan kerugian ditanggung pemilik lahan untuk memperbaiki kerusakan.
2. Faktor penghambat penerapan sistem bagi hasil pada wisata air panas Desa Bora adalah minimnya anggaran dan kurangnya sarana dan prasarana. Anggaran pengelolaan pariwisata yang bersumber dari APBD masih sangat minim dalam rangka pengembangan infrastruktur dari wisata air panas Bora yang berdampak kepada kurangnya sarana dan prasarana yang

menjadi fasilitas penunjang bagi wisatawan yang ingin melakukan kegiatan wisata.

B. Implementasi Penelitian

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Sebaiknya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat memperluas kajian mengenai bagi hasil.

2. Pemerintah Desa

Baiknya pemerintah desa menjadi fasilitator antara masyarakat dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi agar dapat membuat kesepakatan secara tertulis mengenai pengelolaan bagi hasil wisata air panas Bora.

3. Pengelola Wisata Air Panas Bora

Sebaiknya perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan dengan pengelola wisata air panas Bora dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi dilakukan secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alia, H., dan Yaya, R., Persepsi Analisis Kredit Bank Konvensional dan Bank Syariah Terhadap Akuntansi Dalam Perspektif Syariah, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 7 No. 1, Januari 2006.
- Beik, I. S., *Urgensi Standarisasi Akuntansi Perbankan Syariah*, www.tazkiaonline.com, 2006,.
- Dimiyati, Mohammad. Gap Harapan Nasabah Dengan Persepsi Manajemen Atas Kualitas Layanan. *Jurnal Perbankan* Vol. 2 No. 2, 2020.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Hameed, Shahul. *Different Accounting for Different Worldviews the Need for an Islamic Accounting*. Artikel Disampaikan pada Regional Panel Porum on Islamic Accounting, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak dipublikasikan, 2002.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi 1, Cetakan 2, BPFE UGM, Yogyakarta, 2002.
- Irfan, Ali., Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi, *Lintasan Ekonomi*, Vol. XIX No. 2, Juli 2002.
- Khomsiyah, Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian secara Simultan, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya, 16-17 Oktober 2003.
- Khomsiyah dan Susanti, Pengungkapan, Asimetri Informasi dan Cost of Capital, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VII*, Surabaya, 16-17 Oktober 2003.
- Lisdawati, Syaifullah. Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Prespektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Bank Muamalat Cabang Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 1, 2019

- Makaryanawati, Tinjauan Deskriptif Atas Informasi yang Diungkapkan dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Di Indonesia dan di Malaysia, *IKTISADA*, Vol. 2 No. 2, 2003.
- Mardiyah, A. A., Pengaruh Informasi Asimetri dan Disclosure terhadap Cost of Capital, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 5 No 2, Mei 2002.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya
- Sari, R., dan Zuhrohtun, Keinformatifan Laba di Pasar Obligasi dan Saham: Uji Liquidation Option Hypothesis, *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX*, Agustus 2006.
- Subroto, Bambang. Pengungkapan, Pengauditan, dan Kepercayaan Investor, *Lintasan Ekonomi*, Vol. XXI, No. 1, Januari 2004.
- Siti, A. M., Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi terhadap Cost of Equity Capital pada Perusahaan Publik di Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, Mei 2004.
- Susanto, A. *Membangun Loyalitas Nasabah Bank Syariah*, www.tazkiaonline.com
- Tjiptono, Fandy. *Manajemen Jasa*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta. 2000.
- Yusoh, Wan dan Wan Ismail. Islamic Accounting. Makalah disampaikan pada *International Conference on Islamic Banking and Finance dan EKABA FE Universitas Trisaksi* Jakarta, 11-12 Juni 2001.

Pertanyaan Wawancara Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi

1. Sejak kapan wisata air panas Desa Bora ini mulai dibuka?
2. Bagaimana sistem pengelolaan bagi hasil keuangan wisata air panas Desa Bora?
3. Berapa besar persentase bagi hasilnya?
4. Apakah ada perjanjian tertulis mengenai bagi hasil tersebut?
5. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wisata air panas Desa Bora?
6. Apa upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam mengatasi kendala tersebut?

Pertanyaan Wawancara Perangkat Desa

1. Bagaimana sistem pengelolaan bagi hasil keuangan wisata air panas Desa Bora?
2. Berapa besar persentase bagi hasilnya?
3. Bagaimana penentuan bagi hasilnya?

4. Apakah terdapat pembagian kerugian?
5. Apakah ada perjanjian tertulis mengenai bagi hasil tersebut?
6. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wisata air panas
Desa Bora?

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai wisata air panas Desa Bora?
2. Sebagai pemilik lahan apakah saudara menerima keuntungan dari pendapatan wisata air panas Desa Bora?
3. Apakah ada perjanjian yang dilakukan dengan pihak terkait dengan pembagian keuntungan?
4. Apakah bagian keuntungan dibayarkan setiap bulannya?
5. Apakah pernah ada ketidakpuasan dari masyarakat dalam pembagian keuntungan?



Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi



Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi



Wawancara dengan Pemilik Lahan



Wawancara dengan Pemilik Lahan



Wawancara dengan Pemilik Lahan



Wawancara dengan Perangkat Desa



Wawancara dengan Sekretaris Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ardi setiawan

Tempat Tanggal Lahir : Bora 06-September-1999

NIM : 195150137



Jurusan : Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
 Alamat : Desa Bora
 No. Telp : 085757563726
 Email : Ardi98048@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah Kandung : Tasbi
 Nama Ibu Kandung : Salma
 Alamat : Desa Bora

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Selesai
SD	SDN 1 Bora	2007	2012
SMP	MTS Alkhairat Bora	2012	2015
SMA	SMAN 8 Sigi	2015	2018
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Datokarama Palu	2019	2023

Palu, Agustus 2023
 Mahasiswa

Ardi Setiawan